

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Fathin, dan Triono Eddy. "Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (*Non-conviction based asset forfeiture*) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9.1 (2021)
- Akhrijulian, Vadli, dan Padmono Wibowo. "Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.1 (2022)
- Alfian, Nurul. "Nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan Fraud." *AKTIVA: Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1.2 (2016)
- Amir, Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Anugrah, Roby, Raja Desril, dan Hari Sutra Disemadi. "Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945." *Kertha Wicaksana* 14.2 (2020)
- Arifin, Ridwan, Indah Sri Utari, dan Herry Subondo. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 1.1 (2017)
- Arifuddin, Ilham Fathir, dan Hudi Yusuf. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Sektor Perbankan." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.9 (2024)
- Aritonang, Yohana Eirene Aprilita, July Esther, dan Herlina Manullang. "Peranan Kejaksanaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksanaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review* 1.1 (2022)
- Aryani, Reni, dan Chrisbiantoro Chrisbiantoro. "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 3.1 Juni (2024)
- Asnawi, "Penerapan *Non-conviction based asset forfeiture* terhadap Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korups dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2016)
- Astaman, Ruslan Renggong, dan Basri Oner. "Tindakan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6.1 (2023)
- Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11.2 (2022)
- Azhar, Iqlima. "Pengaruh kualitas aparaturnya daerah dan regulasi terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)* 1.1 (2017)
- Azrica, Hanita, Rahmad Safitri, dan Muhammad Riza Muarriif. "Multiplier Effect Pemulihan Aset di Kejaksanaan." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 15.2 (2023)

- Badaru, Baharuddin, dan Siswandi Siswandi. "Efektivitas kejaksanaan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1.2 (2020)
- Bagye, Wire, Maulana Ashari, dan Mohammad Taufan Asri Zaen. "Prototipe Alat Kirim Pesan Singkat Tindak Kejahatan Sebagai Solusi Peningkatan Keamanan Berbasis Lokasi." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 19.1 (2019)
- Bahri, Muhammad Syamsul, dkk, "Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2024)
- Budianto, Azis, dkk, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 7.1 (2025)
- Christian, Natalis, dkk, "Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3.3 (2023)
- Damayanti, Ratna Ayu. "Hubungan keagenan pemerintahan daerah dalam konteks anggaran: sebuah agenda rekonstruksi." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 15.2 (2011)
- David Fredriek Albert Porajow, "Non-Conviction Based Asset Fofeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (2013)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 21 (2009)
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2016)
- Ferdianti, Gharin Eka, dan Hero Priono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11.2 (2022)
- Fitriyani, Desi. "The Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia." *AML/CFT JOURNAL: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism* 1.2 (2023)
- Goldwen, Fishella, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto dalam Pig Butchering Scam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8.3a (2024)
- Hadikristanto, Wahyu, dan Nanang Tedi Kurniadi. "Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Aset Pada PT. Utama Karya (Persero)." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 5.4 (2023)
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6.3 (2021)
- Hafidz, Jawade. "Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011)
- Hamamah, Fatin, dan Heru Hari Bahtiar. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019)

- Harun, Muhamad, dan Aditia Noegraha. "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1.2 (2023)
- Helmi, "Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset", *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga* (2017)
- Ilmiah, Ifa Nurul, dkk, "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi." *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business* 3.1 (2024)
- Imelda, Rezky, dan Sandra Dewi. "Pengembalian Barang Bukti Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Di Rupbasan Rengat." *Collegium Studiosum Journal* 7.2 (2024)
- Imron, Ali. "Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi)." *Res Nullius Law Journal* 6.2 (2024)
- Jouanny, Jean-Pierre. "The role of Interpol in Countering the traffic in Cultural Property." *International Preservation News* 45 (2008)
- Juliani, Rika Dwi, dan Syofiaty Lubis. "Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan *non-conviction based asset forfeiture*: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9.1 (2023)
- July Wiarti, "*Non- Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)", *Journal UIR Law Review* 1 (2017)
- Khadafy, Rezky Noor, Marwan Mas, dan Zulkifli Makkawaru. "Penanganan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Makassar." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3.2 (2021)
- Khairunnisa, Adriana, dkk, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024)
- Komara, Ryan Andreansyah. *Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Eksekusi Barang Bukti Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Disita Oleh Negara*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022)
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, dan Ayub Torry. "Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional." dalam <http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/>, diakses pada 15 (2015)
- La Ode, Yustamin, dan Risma Risma Yulestari. "Optimalisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 2.1 (2024)
- Laila, Umar. "Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara)." *Journal I La Galigo* 5.1 (2022)

*Laporan Tahunan Kejaksaan 2023*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

Lienaldy, Denny Novian, dkk, "Pembuatan UU Perampasan Aset ditinjau dari Parameter Ahli." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1.3 (2024)

Mabsus, Muhammad Irfan Fadilla, Gunawan Jatmiko, dan Fristia Berdian Tamza. "Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2.2 (2025)

Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49.3 (2020)

Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 6 (2015)

Mellyan, Mellyan. "Social Media Marketing; Strategi Komunikasi Bisnis Era Digital (Studi Analisis Portal TaniFund. com)." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* (2020)

Miladmahesi, Rosita. "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 22.1 (2020)

Mustofa, Wahid. "Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi." *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*. Vol. 2. No. 02. 2025.

Nadhiroh, Nadhiroh, dkk, "Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Berita Republika. co. id untuk Meningkatkan Peran Media Islam." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5.2 (2024)

Nasrudin, Edy. "Efektivitas sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) terhadap pengelolaan aset negara." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 13.2 (2015)

Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2019

Ningrum, Fatima Retno, dkk, "Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Rahn." *Asy-Syari'ah* 25.1 (2023)

Nisa, Fachrun, dan Nurul Chafid. "Penerapan Internet of Things (Iot) Pada Sistem Monitoring Ruang Server di PT. Macrocentra Niaga Boga." *Jurnal Satya Informatika* 6.01 (2021)

Nugrohandini, Dwi, dan Ety Mulyati. "Akibat Hukum Gugatan Dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.1 (2019)

Nur, Andi Cudai, Fitrah In Ramahani Erwin, dan Muh Nur Yamin. "Transparency Of The Booty Auction At The Jeneponto State Attorney." *Jurnal Aktor* 15.1 (2024)

Nurdiansyah, Edwin. "Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3.2 (2016)

Pakpahan, Rudi Hendra, dan Aras Firdaus. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2019)

Pardede, Marulak. "Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020)

- Pinem, Srimin, Rizkan Zulyadi, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 10.2 (2023)
- Pranoto, Agus, Abadi B. Darmo, dan Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10.1 (2019)
- Pratama, Arya Satya, dkk, "Pengaruh Artificial Intelligence, Big data dan otomatisasi terhadap kinerja SDM di Era digital." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2.4 (2023)
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan, dan D. P. R. Keahlian. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara: Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.
- Putra, Indra Agung Perdana, dan Anang Shopphan Tornado. "Eksistensi Lelang Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Yang Hasilnya Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Sosial." *Badamai Law Journal* 5.1
- Putri, Dina Desvita Pramesti. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19.2 (2024)
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 021/PUU-III/2005
- Rahma Yanti, Rahmayanti Yanti. "Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1.1 (2018)
- Reza, Muhammad Ghulam. "Kebijakan Hukum Pidana Perampasan Aset "Non-conviction based asset forfeiture" Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.1 (2024)
- Ronaldi, Ronaldi, dan Yolanda Leorenza Zahro. "Pelaksanaan Eksekusi Barang Rampasan Perkara Tindak Pidana Umum Dengan Cara Penjualan Langsung Pada Kejaksaaan Negeri Palangka Raya." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2022)
- Samsul Karmaen. "Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan yang Adil dalam Konteks Ekonomi Islam." *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman* 4.1 (2024)
- Sandri, Bobbi, dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Badan sebagai Pengganti dalam Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* 4.2 (2016)
- Sanjaya, Arif Putra, dan Indra Hidayatullah. "Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2.2 (2020)
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, dan Hery Firmansyah. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *UNES Law Review* 6.2 (2023)
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-conviction based asset forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3.1 (2017)

- Saragih, Friska, dan M. Musdholifah. "Pengaruh growth opportunity, firm size, dan liquidity terhadap keputusan hedging pada perusahaan perban kan indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 5.2 (2017)
- Sekarsari, Dila May, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara. "Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.3 (2022)
- Shoimuna, Muhammad Dawud. "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik." *Public Service And Governance Journal* 5.1 (2024)
- Sianturi, S. R. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Silitonga, Sarma. "Tanggungjawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2020)
- Simanjuntak, Tumpak Haposan. "Audit Internal terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan Pemerintah Daerah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8.1 (2024)
- Simarmata, Marusaha, dan Hudi Yusuf. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.9 (2024)
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1.1 (2016)
- Sofwan, Syifa Vidya, dan Titin Sulastri. "Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung." *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba* 10.3 (2019)
- Sormin, Riawindo Asay. *Kajian Hukum Mengenai Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Sebelum Dilimpahkan Ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2021.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020)
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020)
- Sugiantoro, Bambang, dan Jazi Eko Istiyanto. "Analisa Sistem Keamanan Intrusion Detection System (IDS), Firewall System, Database System Dan Monitoring System Menggunakan Agent Bergerak." *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*. Vol. 1. No. 3. 2015.
- Suhariyanto, Budi. "Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5.3 (2016)
- Sulaiman Bakri. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Untad*. 2017
- Sutiawan, Hendrik Agus, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin. "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana

- Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.3 (2018)
- Takaliuang, Herry Yanto. “Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam Kuhap.” *Lex Crimen* 3.4 (2014)
- Tantimin, Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-conviction based asset forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023)
- Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui *Non-conviction based asset forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5.1 (2023)
- Theodore S.Greenberg et al., *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-conviction based asset forfeiture* (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009)
- Wartoyo, Wartoyo. “Sistem Regulasi Dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1 (2019)
- Ziouvas, Dimitris. “International asset recovery and the united nations convention against corruption.” *The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law* (2018)
- Internet:**
- Brian, Duignan. (2023, November 15). “Utilitarianism.” Dambil dari Britannica, <https:// /topic /utilitarianismphilosophy>
- Kustiasih,Rini. (2022, Maret 23). “DPR Minta Kejaksaaan Tingkatkan Pendapatan Negara dari Kasus Korupsi.” Di ambil dari laman Kompas. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/23/dpr-minta-kejaksaaan-tingkatkan-pendapatan-negara-dari-kasus-korupsi>
- Medistiara, Yulida. (2021, Desember 29).”Hingga November Hingga November 2021, Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp 21,2 T.” Diambil dari laman detikNews.<https://news.detik.com/berita/d-5876198/hingga-november-2021-kejagung-selamatkan-keuangan-negara-rp-21-2-t>
- Miftakhudin, Anas. ( 2017, Desember 6) “Tersangka Korupsi Rp 5,3 Miliar Meninggal Dunia Saat Berstatus Tahanan Kejati Jatim.” Dia,bil dari laman Surabaya Tribunnews. <https://surabaya.tribunnews.com/2017/12/06/tersangka-korupsi-rp-53-miliar-meninggal-dunia-saat-berstatus-tahanan-kejati-jatim-apa-sebabnya>
- Purnama , Surya hadi . (2021, Desember 17). Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset. Diambil dari artikel KPKNL Palu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana>,
- Tjandra, W.Riawan.** “*Pedoman Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Bukti yang Disita*. Diambil dari laman **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**. [https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR\\_ROADSHOW/Pengelolaan-barang-hasil-tipikor-Riawan-Tjandra.pdf](https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Pengelolaan-barang-hasil-tipikor-Riawan-Tjandra.pdf)

- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2021
- Republik Indonesia (2021). Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI.
- Republik Indonesia (2023). Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- Republik Indonesia (2025). Undang-undang R.I. Nomor Tahun 2025 Tentang KUHAP
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2019). PP No. 54. Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kementarian Hukum dan Ham. (2014). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Negara.
- Presiden R.I (1999). Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1999 tentang Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (TNPK).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PMK No. 162 tahun 2023.
- Kejaksaan Agung. (2022) Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti dan Barang Rampasan di Lingkungan Kejaksaan RI.
- Kejaksaan Agung. (2022). Pedoman Jaksa Agung No,3 Tahun 2022 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi di Lingkungan Kejaksaan RI.